

Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Peningkatan Pelayanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya

Muchammad Nur Salim¹, Eva Hany Fanida², Meirinawati³, Deby Febriyan Eprilianto⁴

Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 25 June 2026

Available online 08 July 2026

Keywords

Innovation, SIREKAP, Elections.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The Recapitulation Information System (Sirekap) is an e-government-based innovation designed to support transparency, accountability, effectiveness, and efficiency in the vote recapitulation stage of elections. This study employed a descriptive qualitative research method. Data were collected through interviews, observations, literature review, and documentation. The findings indicate that the implementation of SIREKAP at the General Election Commission (KPU) of Surabaya City has fulfilled most of the public sector innovation success indicators proposed by Bugge et al. (2018). The innovation has improved public service quality by accelerating the dissemination of election result information, enhancing transparency, and increasing the efficiency of the vote recapitulation process. Nevertheless, further improvements in human resource capacity, information technology infrastructure, and system evaluation are necessary to ensure that the implementation of SIREKAP becomes more effective and sustainable.

ABSTRAK

Sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) merupakan inovasi berupa aplikasi berbasis e-government yang mendukung transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam tahapan rekapitulasi hasil pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, kajian kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIREKAP di KPU Kota Surabaya telah memenuhi sebagian besar indikator keberhasilan inovasi sektor publik menurut Bugge dkk. (2018). Inovasi ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan melalui percepatan penyampaian informasi hasil pemilu, peningkatan transparansi, dan efisiensi proses rekapitulasi suara. Meskipun demikian, penyempurnaan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas evaluasi sistem masih diperlukan agar implementasi SIREKAP dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mendorong berbagai instansi pemerintah untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari implementasi *electronic government* (e-government). Penerapan teknologi dalam pelayanan publik bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu lembaga yang mengimplementasikan transformasi digital tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui pengembangan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). Aplikasi ini dikembangkan sebagai media publikasi hasil penghitungan suara sekaligus alat bantu proses rekapitulasi hasil pemilu secara elektronik sehingga diharapkan mampu mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Pemanfaatan SIREKAP menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Kota Surabaya sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah pemilih tetap (DPT) sebanyak 2.218.586 jiwa, meningkat dibandingkan Pemilu 2019 yang berjumlah 2.131.756 pemilih. Peningkatan jumlah pemilih tersebut berdampak pada semakin besarnya beban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan

proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara cepat, akurat, dan transparan. Kondisi tersebut menuntut KPU Kota Surabaya untuk memanfaatkan inovasi teknologi informasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.

SIREKAP merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) yang sebelumnya digunakan sebagai media publikasi hasil pemilu. Berbeda dengan SITUNG, SIREKAP tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga mendukung proses rekapitulasi suara melalui aplikasi berbasis web dan perangkat bergerak (*mobile*). Kehadiran sistem ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan pencatatan manual, mempercepat proses rekapitulasi, serta meningkatkan transparansi hasil penghitungan suara yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi SIREKAP pada Pemilu 2024 masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain gangguan server pada saat penggunaan secara bersamaan, kesalahan pembacaan data, kendala autentikasi pengguna, serta masih ditemukannya kesalahan teknis pada aplikasi *mobile*. Selain kendala teknis, muncul pula permasalahan yang berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap hasil rekapitulasi elektronik, terutama ketika terjadi perbedaan hasil penghitungan antara tingkat kecamatan dan tingkat kota. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola inovasi, serta kemampuan lembaga dalam mengelola perubahan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SIREKAP mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi proses rekapitulasi suara. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek implementasi teknologi, kepuasan pengguna, atau efektivitas sistem secara umum. Penelitian mengenai inovasi SIREKAP dari perspektif inovasi sektor publik, khususnya menggunakan indikator keberhasilan inovasi yang dikemukakan oleh Bugge dkk., masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi SIREKAP pada KPU Kota Surabaya sebagai salah satu daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia juga masih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam meningkatkan pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Analisis dilakukan menggunakan indikator keberhasilan inovasi sektor publik yang dikembangkan oleh Bugge dkk., meliputi tata kelola inovasi, sumber ide inovasi, budaya inovasi, kemampuan dan alat pendukung, tujuan serta hasil inovasi, dan pengelolaan informasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital serta menjadi bahan evaluasi bagi KPU dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu pada periode berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan secara mendalam implementasi inovasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam meningkatkan pelayanan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena implementasi inovasi pelayanan publik berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Sekretariat KPU Kota Surabaya yang berlokasi di Jalan Adityawarman Nomor 87, Surabaya, dengan pertimbangan bahwa KPU Kota Surabaya merupakan penyelenggara Pemilu yang menerapkan aplikasi SIREKAP sebagai inovasi pelayanan berbasis *e-government*.

Fokus penelitian mengacu pada indikator keberhasilan inovasi sektor publik yang dikembangkan oleh Bugge dkk. (2018), yaitu: (1) *governance and innovation* (tata kelola inovasi), (2) *sources of ideas for innovation* (sumber ide inovasi), (3) *innovation culture* (budaya inovasi), (4) *capabilities and tools* (kemampuan dan alat), (5) *objectives, outcomes, drivers, and obstacles* (tujuan, hasil, pendorong, dan hambatan), serta (6) *collecting innovation data for single innovations* (pengumpulan data inovasi). Keenam indikator tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis keberhasilan implementasi SIREKAP di KPU Kota Surabaya.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *snowball sampling*, sehingga informan dipilih secara bertahap berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya yang dianggap memahami implementasi SIREKAP. Informan penelitian meliputi anggota KPU Kota Surabaya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau pemilih yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui informan penelitian serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen KPU, laporan penyelenggaraan pemilu, buku, dan artikel ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan SIREKAP di lingkungan KPU Kota Surabaya. Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian untuk memperoleh informasi yang mendalam dari para informan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen resmi, laporan, regulasi, foto kegiatan, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan implementasi aplikasi SIREKAP.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga diperoleh informasi yang valid dan mencapai kejenuhan data sehingga mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi inovasi aplikasi SIREKAP dalam peningkatan pelayanan di KPU Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai implementasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya pada Pemilu Tahun 2024. Analisis dilakukan menggunakan teori keberhasilan inovasi sektor publik menurut Bugge dkk. (2018), yang meliputi enam indikator, yaitu *governance and innovation*, *sources of ideas for innovation*, *innovation culture*, *capabilities and tools*, *objectives, outcomes, drivers, and obstacles*, serta *collecting innovation data for single innovations*. Keenam indikator tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi SIREKAP mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital dalam penyelenggaraan pemilu. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi SIREKAP telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi, efektivitas, dan efisiensi proses rekapitulasi hasil pemilu, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan organisatoris yang memerlukan penyempurnaan guna mendukung keberlanjutan inovasi pada penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

1. Governance and Innovation (Tata Kelola Inovasi)

Tata kelola inovasi merupakan aspek yang menentukan keberhasilan suatu inovasi melalui dukungan regulasi, sistem koordinasi, serta mekanisme implementasi yang jelas. Bugge dkk. (2018), menjelaskan bahwa keberhasilan inovasi sektor publik dipengaruhi oleh

kemampuan organisasi dalam membangun kerangka kelembagaan dan tata kelola yang mampu mendukung pelaksanaan inovasi secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIREKAP di KPU Kota Surabaya telah didukung oleh landasan regulasi yang kuat, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 66 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2024 yang mengatur penggunaan SIREKAP sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara, proses rekapitulasi, dan alat bantu rekapitulasi hasil pemilu. Kejelasan regulasi tersebut memberikan legitimasi hukum terhadap penggunaan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Selain dukungan regulasi, KPU Kota Surabaya menerapkan sistem koordinasi berjenjang melalui mekanisme *Training of Trainers* (ToT). Dalam mekanisme ini, KPU memberikan pelatihan kepada PPS yang kemudian bertindak sebagai fasilitator bagi KPPS di wilayah masing-masing. Sistem tersebut memungkinkan transfer pengetahuan secara lebih efektif kepada ribuan penyelenggara pemilu yang tersebar di seluruh Kota Surabaya.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Osborne dan Brown (2011), yang menyatakan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membangun sistem kelembagaan yang mendukung keberlangsungan inovasi. Dengan demikian, tata kelola inovasi SIREKAP di KPU Kota Surabaya dapat dikategorikan baik karena telah memiliki dasar hukum yang jelas, pola koordinasi yang sistematis, serta mekanisme pelatihan yang mendukung implementasi inovasi.

2. Source of Ideas for Innovation (Sumber Ide Inovasi)

Menurut Bugge dkk. (2018), sumber ide inovasi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Inovasi yang berhasil umumnya lahir dari proses evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi serta masukan dari pengguna layanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya SIREKAP tidak terlepas dari evaluasi terhadap penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilu 2014 dan 2019 yang masih memiliki keterbatasan dalam pengolahan data karena bergantung pada Microsoft Excel dan proses input manual. Selain itu, pengalaman penggunaan SIREKAP pada Pilkada Tahun 2020 menjadi sumber pembelajaran penting dalam penyempurnaan sistem yang digunakan pada Pemilu 2024.

Pengalaman kegagalan server dan kendala teknis pada Pilkada 2020 menjadi dasar bagi KPU RI untuk melakukan berbagai pengembangan sistem, termasuk peningkatan kapasitas server, penguatan fitur aplikasi, dan penyempurnaan mekanisme penggunaan di lapangan. Proses tersebut menunjukkan bahwa inovasi SIREKAP berkembang melalui pendekatan *learning organization*, yaitu organisasi yang belajar dari pengalaman sebelumnya untuk menghasilkan pembaruan yang lebih baik.

Temuan ini sesuai dengan teori Rogers (2003), yang menjelaskan bahwa inovasi muncul sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi. Dalam konteks ini, SIREKAP merupakan bentuk solusi atas kebutuhan sistem rekapitulasi yang lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Innovation Culture (Budaya Inovasi)

Budaya inovasi berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan komitmen organisasi dalam mendukung perubahan dan pembaruan. Bugge dkk. (2018) menegaskan bahwa budaya inovasi tercermin dari dukungan pimpinan, keterbukaan terhadap perubahan, dan kemampuan organisasi dalam mengelola risiko inovasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Surabaya memiliki budaya inovasi yang cukup baik. Hal tersebut tercermin dari internalisasi motto “KPU Melayani” yang menjadi pedoman seluruh penyelenggara pemilu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen tersebut terlihat dari kesediaan jajaran KPU untuk memberikan pendampingan secara intensif kepada badan adhoc selama tahapan Pemilu berlangsung.

Budaya inovasi juga ditunjukkan melalui pendekatan gotong royong dalam pelaksanaan tugas. KPU, PPK, PPS, dan KPPS membangun pola kerja kolaboratif untuk memastikan seluruh tahapan penggunaan SIREKAP berjalan sesuai prosedur. Sistem koordinasi yang berjenjang memungkinkan penyelesaian masalah dilakukan secara cepat ketika ditemukan kendala di lapangan.

Menurut Tidd dan Bessant (2018), organisasi yang inovatif memiliki karakteristik berupa kepemimpinan yang mendukung inovasi, keterbukaan terhadap perubahan, serta kemampuan belajar dari pengalaman. Karakteristik tersebut telah terlihat dalam implementasi SIREKAP di KPU Kota Surabaya, terutama melalui upaya evaluasi dan perbaikan yang terus dilakukan berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya.

4. Capabilities and Tools (Kemampuan dan Alat)

Kemampuan dan alat merupakan indikator yang berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia serta ketersediaan sarana pendukung dalam menjalankan inovasi. Keberhasilan inovasi digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam mengoperasikan teknologi yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis penyelenggara pemilu melalui kegiatan bimbingan teknis, simulasi penggunaan aplikasi, dan pendampingan berjenjang. Pembekalan diberikan kepada PPS dan KPPS agar memahami tata cara penggunaan SIREKAP sebelum hari pemungutan suara.

Dari sisi teknologi, SIREKAP hadir dalam dua platform, yaitu SIREKAP Mobile yang digunakan KPPS untuk mendokumentasikan dan mengunggah formulir hasil penghitungan suara serta SIREKAP Web yang digunakan PPK dan KPU untuk melakukan monitoring dan rekapitulasi data. Sistem ini memanfaatkan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) untuk membaca data hasil penghitungan suara secara otomatis.

Meskipun demikian, penelitian menemukan masih terdapat beberapa kendala teknis seperti fitur aplikasi yang tidak dapat berfungsi secara optimal pada hari pemungutan suara serta keterbatasan perangkat yang digunakan oleh sebagian petugas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas teknis dan kesiapan perangkat masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan SIREKAP ke depan.

5. Objectives, Outcomes, Drivers, and Obstacles (Tujuan, Hasil, Pendorong, dan Hambatan)

Tujuan utama penggunaan SIREKAP adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi proses rekapitulasi hasil pemilu. Selain berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara, SIREKAP juga digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi dan pengelolaan data hasil pemilu secara digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIREKAP mampu mempercepat proses publikasi hasil pemilu dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara real-time. Kehadiran sistem ini juga meningkatkan keterbukaan informasi publik karena hasil penghitungan suara dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat.

Faktor pendorong implementasi SIREKAP antara lain meningkatnya jumlah pemilih di Kota Surabaya, kebutuhan transparansi hasil pemilu yang semakin tinggi, serta komitmen KPU untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah hambatan. Hambatan tersebut meliputi ketidaksesuaian data antara formulir C.Hasil dan data yang tampil dalam sistem,

perbedaan hasil rekapitulasi yang ditemukan pada tingkat kecamatan, serta beberapa gangguan teknis pada aplikasi. Kasus perbedaan data yang terjadi di Kecamatan Wonocolo menunjukkan bahwa aspek keamanan dan keandalan sistem masih memerlukan penguatan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil rekapitulasi elektronik.

6. Collecting Innovation Data for Single Innovations (Pengumpulan Data Inovasi)

Pengumpulan data inovasi merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan organisasi dalam mengelola informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan inovasi berikutnya. Bugge dkk. (2018) menekankan bahwa inovasi yang berkelanjutan memerlukan sistem evaluasi dan pembelajaran yang terstruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SIREKAP dilakukan melalui proses evaluasi berkelanjutan terhadap sistem sebelumnya, yaitu SITUNG. KPU RI memanfaatkan berbagai pengalaman implementasi, termasuk temuan permasalahan pada Pilkada 2020, sebagai dasar penyempurnaan sistem yang digunakan pada Pemilu 2024.

Selain itu, integrasi SIREKAP dengan sistem informasi KPU memungkinkan data hasil rekapitulasi dapat diakses secara real-time oleh masyarakat. Kemampuan pengumpulan dan penyajian data secara cepat menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan informasi dibandingkan sistem sebelumnya.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa mekanisme pengumpulan umpan balik dari pengguna di tingkat lapangan masih perlu diperkuat. Masukan dari KPPS, PPS, maupun PPK belum seluruhnya terintegrasi secara sistematis ke dalam proses pengembangan aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang lebih terstruktur agar setiap permasalahan teknis yang ditemukan dapat menjadi dasar perbaikan inovasi pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Secara keseluruhan, berdasarkan enam indikator keberhasilan inovasi menurut Bugge dkk. (2018), implementasi SIREKAP di KPU Kota Surabaya telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital melalui peningkatan transparansi, efektivitas, dan aksesibilitas informasi pemilu. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan pada aspek teknis, keamanan sistem, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan inovasi secara lebih optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai inovasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam meningkatkan pelayanan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dengan menggunakan indikator keberhasilan inovasi sektor publik menurut Bugge dkk. (2018), dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pada indikator *governance and innovation* (tata kelola inovasi), implementasi SIREKAP telah didukung oleh regulasi, struktur organisasi, dan mekanisme koordinasi yang jelas. KPU Kota Surabaya melaksanakan tata kelola inovasi melalui pembagian tugas yang terstruktur antara KPU, PPK, PPS, dan KPPS serta didukung kegiatan *Training of Trainers* (ToT) dan bimbingan teknis. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa metode penyampaian materi teknis masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang lebih aplikatif dan berbasis simulasi agar kemampuan seluruh penyelenggara lebih merata.

2. *Sources of ideas for innovation* (sumber ide inovasi), pengembangan SIREKAP merupakan hasil evaluasi berkelanjutan terhadap sistem informasi pemilu sebelumnya serta masukan dari berbagai penyelenggara pemilu. Inovasi tidak hanya berasal dari kebijakan internal KPU, tetapi juga dibentuk melalui pengalaman implementasi di lapangan, sehingga pengembangan aplikasi menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan operasional penyelenggaraan pemilu.

3. Innovation culture (budaya inovasi), KPU Kota Surabaya telah membangun budaya organisasi yang mendukung perubahan melalui komitmen pelayanan publik, kerja sama antarpemangku, dan keterbukaan terhadap proses evaluasi. Budaya inovasi tersebut mendorong organisasi untuk menjadikan setiap kendala selama implementasi sebagai bahan pembelajaran dalam penyempurnaan sistem, sehingga inovasi dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

4. Capabilities and tools (kemampuan dan alat), implementasi SIREKAP didukung oleh ketersediaan perangkat teknologi, pelatihan teknis, dan sistem pendukung operasional. Namun demikian, penelitian masih menemukan beberapa kendala berupa keterbatasan kapasitas digital sebagian petugas, gangguan server pada waktu penggunaan bersamaan, serta ketidakstabilan jaringan internet di beberapa lokasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

5. Objectives, outcomes, drivers, and obstacles (tujuan, hasil, pendorong, dan hambatan), penerapan SIREKAP telah memberikan manfaat dalam meningkatkan kecepatan publikasi hasil penghitungan suara, transparansi informasi kepada masyarakat, serta efisiensi proses rekapitulasi. Namun demikian, masih terdapat hambatan teknis seperti sinkronisasi data, pembacaan hasil pindai, dan gangguan sistem yang perlu terus disempurnakan agar kualitas pelayanan semakin optimal.

6. Collecting innovation data for single innovations (pengumpulan data inovasi), KPU Kota Surabaya telah melaksanakan evaluasi terhadap implementasi SIREKAP melalui monitoring, pelaporan, dan identifikasi kendala teknis selama tahapan pemilu. Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan sistem, termasuk penyempurnaan fitur dan mekanisme penggunaan aplikasi pada penyelenggaraan pemilu berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses evaluasi telah menjadi bagian penting dalam siklus pengembangan inovasi pelayanan publik.

Secara keseluruhan, implementasi SIREKAP di KPU Kota Surabaya telah memenuhi sebagian besar indikator keberhasilan inovasi sektor publik menurut Bugge dkk. (2018). Inovasi ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan melalui percepatan penyampaian informasi hasil pemilu, peningkatan transparansi, dan efisiensi proses rekapitulasi suara. Meskipun demikian, penyempurnaan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas evaluasi sistem masih diperlukan agar implementasi SIREKAP dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota Surabaya disarankan untuk meningkatkan kualitas pembekalan dan bimbingan teknis bagi petugas KPPS melalui pelatihan berbasis simulasi penggunaan SIREKAP, termasuk penanganan berbagai kendala teknis yang berpotensi terjadi pada hari pemungutan suara. Selain itu, KPU perlu memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan kendala dengan menyediakan *helpdesk* teknis serta prosedur eskalasi yang jelas agar setiap permasalahan dapat ditangani secara cepat dan efektif.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji aspek keamanan data, mekanisme pengawasan penggunaan SIREKAP, serta melakukan studi komparatif mengenai implementasi SIREKAP di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda guna menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi penguatan tata kelola pemilu digital.

REFERENSI

- Bugge, M. M., Mortensen, P. S., & Bloch, C. (2018). Understanding public sector innovation: Towards a conceptual framework and measurement approach. *Science and Public Policy*, 45(1), 12–23.
- Bungin, B. (2012). *Analisis data penelitian kualitatif*. Rajawali Pers.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Osborne, S. P., & Brown, L. (2011). *Innovation, public policy and public services delivery in the UK: The word that would be king?* *Public Administration*, 89(4), 1335–1350.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Tidd, J., & Bessant, J. (2018). *Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change* (6th ed.). John Wiley & Sons.